

Judul : Di kawasan kumuh disabilitas sulit akses air bersih
Tanggal : Kamis, 25 September 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Di Kawasan Kumuh Disabilitas Sulit Akses Air Bersih

ANGGOTA Komisi IX DPR Nurhadi meminta Pemerintah meningkatkan layanan kesehatan serta pemenuhan akses sanitasi dan air bersih bagi penyandang disabilitas. Hal ini sesuai rekomendasi Koalisi Penguatan Representasi dan Inklusi Perempuan dalam Anggaran (Prima).

Dia menyebut, usulan itu sejalan dengan Prioritas Nasional Keempat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. Jika merujuk aturan, sebenarnya sudah ada payung hukum yang jelas, yakni Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2016.

"Dalam pasal 63 dan 65 disebut, Pemerintah Pusat dan Daerah diwajibkan menjamin ketersediaan layanan kesehatan yang dibutuhkan serta tenaga kesehatan yang kompeten bagi penyandang disabilitas," ujarnya di Jakarta, Selasa (23/9/2025).

Dia menambahkan, aturan tersebut juga diperkuat Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang perencanaan, penyelenggaraan, serta evaluasi pemenuhan hak penyandang disabilitas. Namun, implementasi di lapangan khususnya di tingkat pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) masih jauh dari optimal.

"Ini akan jadi catatan penting bagi kami dalam rapat dengan Kementerian Kesehatan, agar

kewajiban yang sudah diamanahkan UU dijalankan sebaik-baiknya," tutur politisi Fraksi NasDem itu.

Berikutnya, legislator asal Dapil Jawa Timur VI itu juga mengingatkan soal minimnya akses sanitasi dan air bersih. Terutama bagi perempuan di daerah pesisir dan kawasan kumuh perkotaan yang kerap menghadapi kendala berlapis.

Dia mengusulkan agar Komisi IX memiliki data daerah-daerah yang benar-benar minim akses sanitasi dan air bersih. Dengan data yang akurat, pihaknya bisa memberikan masukan sekaligus mengusulkan anggaran secara lebih terukur. "Jadi tahu, misalkan persoalan ini bisa diselesaikan dalam dua tahun atau tiga tahun ke depan," sambungnya.

Wakil Ketua Komisi IX DPR Nihayatul Wafiroh menambahkan, masih banyak fasilitas yang belum ramah bagi penyandang disabilitas. Masalah ini bukan semata-mata soal ketiadaan dana, melainkan karena perspektif inklusif yang belum sepenuhnya terbangun di tingkat layanan dasar.

Pasalnya, kata Nihayatul, sebesar apa pun anggaran jika perspektifnya tidak inklusif, maka layanan tidak akan ramah bagi penyandang disabilitas. "Perlu diingat agar aspek inklusi ini benar-benar dimasukkan dalam setiap perencanaan," ujarnya. ■ PYB